



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Kamis, 4 Juli 2019



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2019**

Daftar Isi

1. TOL LAUT MERUGIKAN (*Media Online Kompas*)
2. AIR WADUK MENYUSUT (*Media Online Republika*)

KOMPAS

Kamis

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

4 Juli 2019

Tol Laut Merugikan

Jasa angkutan tol laut justru merugikan konsumen. Biaya angkut barang naik hingga Rp 5 juta dibandingkan dengan jasa kapal milik swasta.

AMBON, KOMPAS — Program tol laut yang diluncurkan pada November 2015 hingga kini masih dihantui beragam persoalan pada tataran implementasi yang belum semuanya dapat dituntaskan. Di Maluku, program prioritas Presiden Joko Widodo itu dianggap merugikan, tidak efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya.

Dengan keberadaan tol laut tersebut, tarif angkut malah naik hingga Rp 5 juta. Kenaikan itu diungkapkan pengguna jasa tol laut.

Menurut Oyang Augustin, pengguna jasa tol laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, dihubungi Rabu (3/7/2019), mengatakan, saat ini, biaya yang dikeluarkan untuk membayar satu peti kemas dari Surabaya, Jawa Timur, ke Kisar Rp 11,8 juta.

Satu peti kemas ukuran 20 kaki dengan bobot maksimal 18 ton. Artinya, biaya untuk satu

ton Rp 656.000.

Padahal, pada 2016, ongkos untuk satu peti kemas dari Surabaya Rp 6,8 juta. Ongkos tersebut naik menjadi Rp 8,8 juta dan kini menjadi Rp 11,8 juta. Hal ini berarti, sejak tahun 2016, ongkos tol laut membengkak hingga Rp 5 juta.

"Juga ada info dari sesama pengusaha di Kisar, ada yang bayar hanya Rp 10,9 juta. Jadi, tarif ini tidak jelas," ucapnya.

Jika menggunakan kapal swasta yang tidak disubsidi pemerintah, tarif angkut 1 ton barang paling mahal Rp 650.000. Bahkan, kalau sudah langganan, harganya bisa dikurangi Rp 100.000 per ton.

"Di kapal swasta, kami membayar per ton. Kalau pakai tol laut, kami wajib isi satu kontainer sampai penuh karena pembayarannya per kontainer," katanya.

Kenyataan itu sangat bertolak belakang dengan semangat

tol laut yang didengungkan Presiden Joko Widodo.

Merugikan konsumen

Jika menggunakan kapal biasa, waktu perjalanan dari Surabaya ke Kisar paling lama empat hari. Namun, jika menggunakan kapal tol laut waktu perjalanan bisa lebih dari 15 hari. Bahkan, pada angkutan pertama tahun ini, barang yang sudah dimasukkan ke dalam kapal tol laut pada Merat lalu hingga Rabu malam belum tiba di Kisar.

Dengan pertimbangan biaya dan waktu, Oyang menilai, pihaknya rugi. Otomatis, harga jual barang di daerah itu akan dinaikkan untuk menutup pembengkakan biaya. Hal itu jauh dari harapan Presiden yang ingin menekan sekecil mungkin disparitas harga di kawasan timur Indonesia.

Oyang dan banyak pengusaha di daerah itu kini kembali ber-

alih menggunakan kapal swasta yang dianggap lebih murah dan lebih cepat.

"Barang-barang kami sudah dimuat di Surabaya dan siap berangkat. Masih mendiang pakai kapal swasta saja," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kapal tol laut dari Surabaya yang mengangkut barang ke wilayah selatan Maluku terlambat hingga lebih dari tiga bulan. Pengiriman barang dari Surabaya ditutup pada April, kapal baru berangkat pada 9 Mei, dan tiba di Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada 19 Mei.

Lantaran terjadi kerusakan kapal di Saumlaki, distribusi barang ke empat pelabuhan lain, yakni Kisar, Larat, Tapa, dan Moa, terlambat lebih dari tiga bulan. Viandro Tanaya, pengguna jasa tol laut di Larat, mengaku rugi hingga Rp 225 juta (*Kompas*, 3/7). (FRN)

Kebijakan pemerintah mengenai adanya perencanaan Tol Laut yang menjadi salah satu bagian dari konsep poros maritim merupakan langkah baik untuk mengembalikan kembali bangsa Indonesia menjadi negara yang berbasis kelautan, adanya koordinasi kemaritiman yang mencakup empat kementerian yaitu kementerian pariwisata, perikanan dan kelautan, perhubungan dan ESDM akan mendorong percepatan adanya poros maritim dan kebijakan kementerian terkait tidak tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat bagi perkembangan wilayah Indonesia Tol Laut merupakan bagian dari konsep poros maritim yang saya artikan sebagai pembangunan jalur pelayaran dari berbagai penjuru di Indonesia dengan tujuan menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan diberbagai sektor di seluruh Indonesia. Program tol laut yang diluncurkan pada November 2015 itu hingga kini masih dihantui beragam persoalan pada tataran implementasi yang belum semuanya dapat dituntaskan.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #TolLaut #RPJMN #Pelabuhan #KementerianPPN/Bappenas #PerhubunganLaut #PorosMaritim #PelaksanaanProyekNasional #KementerianPUDanPerumahanRakyat #BUMN

REPUBLIKA

KAMIS, 4 JULI 2019

Air Waduk Menyusut

Walau debit air di bawah rata-rata, waduk masih bisa dioperasikan.

JAKARTA — Musim kemarau mulai berdampak pada menyusutnya debit air waduk. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, debit air di 10 waduk dari 16 waduk utama berada di bawah batas rata-rata untuk operasional.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Supriyogi mengatakan, waduk-waduk tersebut mayoritas terdapat di Pulau Jawa. Kendati begitu, Hari tak menyebutkan waduk mana saja yang debit airnya berada di bawah rata-rata. "Ketinggian air minimal 50 meter dalam rencana operasi. Sekarang di bawah 50 meter," kata Hari kepada *Republika*, Rabu (3/7).

Meski ada 10 waduk yang debit airnya di bawah rata-rata, Hari memastikan kondisinya masih tergolong normal. Waduk masih bisa dioperasikan sehingga distribusi air dari waduk ke permukiman sekitar masih dapat dilakukan. Sementara itu, debit air enam waduk utama lainnya, berdasarkan laporan terakhir, masih di atas rata-rata rencana operasional.

Indonesia memiliki 231 waduk. Selain 16 waduk utama, terdapat pula 75 waduk besar lainnya yang tengah dipantau ketat oleh Kementerian PUPR. Dari 75 waduk itu, 14 waduk dalam kondisi normal, 55 di bawah batas rata-rata, dan enam waduk dalam kondisi kering.

"Namun, enam waduk yang kering itu skalanya tidak begitu besar dalam mengairi sekitarnya," kata Hari.

Dia menjelaskan, satu-satunya cara untuk mengoptimalkan fungsi waduk adalah menunggu turunnya hujan. Sebab, ujar dia, fungsi waduk hanya sebagai penampung air hujan dan mendistribusikannya ke area permukiman ataupun persawahan.

Berdasarkan pantauan *Republika*, musim kemarau membuat volume air di Situ Gede, Kota Tasikmalaya, mulai menyusut. Air di Situ Gede tampak mengering hingga sebagian dasar di pinggir waduk itu terlihat.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Sandi Lesmana mengatakan, penyusutan terjadi sejak dua bulan terakhir. Bahkan, air dari Sungai Cibantaran yang merupakan sumber utama air di Situ Gede tak lagi mengalir. "Debit yang masuk dari hulu sudah nol. Tapi ada resapan dari air tanah," kata dia kepada *Republika*, kemarin.

Air Situ Gede berfungsi untuk mengairi lahan sawah sekitar 230 hektare di Kota Tasikmalaya. Dengan menyusutnya air, ratusan hektare lahan sawah tersebut terancam kekeringan. Untuk sementara, sawah-sawah yang bergantung pada Situ Gede masih dapat pasokan air dari resapan tanah. Namun, potensi kekeringan tetap tinggi.

Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya Tata Supriyatna mengatakan, menyusutnya air di Situ Gede sangat memengaruhi kondisi irigasi lahan pertanian di Kota Tasikmalaya, khususnya Kecamatan Kawalu dan

Kecamatan Mangkubumi. Pasalnya, Situ Gede merupakan waduk terbesar yang berada di Kota Tasikmalaya. Meski begitu, menurut dia, kekeringan yang terjadi saat ini belum terlalu berpotensi menyebabkan gagal panen.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, ada 169 hektare lahan sawah yang terancam kekeringan. "Namun, itu belum puso (gagal panen), masih bisa diatasi. Kalau petani bisa mengusahakan pengairan atau sedot air, masih memungkinkan," kata dia.

Di Jawa Tengah, terdapat sejumlah waduk yang debit airnya berada di bawah rencana operasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun melibatkan aparat TNI-Polri untuk melakukan pengawasaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah Eko Yunianto mengatakan, ada 41 bendungan/waduk besar ataupun kecil yang sedang diawasi. Saat ini, kata dia, ada 21 waduk

besar dan waduk kecil yang volume airnya berada di bawah rencana operasional akibat musim kemarau.

Ia menjelaskan, waduk kategori besar adalah waduk yang volume tampungannya lebih besar dari 10 juta meter kubik, sedangkan waduk kecil bervolume tampung kurang dari 10 juta meter kubik. "Ada enam waduk besar yang volume airnya di bawah rencana," kata dia. Enam waduk tersebut, antara lain, Waduk Cacaban, Rawapening, Kedungombo, dan Sempor. Sedangkan, waduk kecil yang volume airnya berada di bawah rencana sebanyak 15 waduk.

Dia menegaskan, selain 21 waduk tersebut, kondisi persediaan air baku di waduk lainnya masih cukup aman. Sebab, volume tampung masih sesuai dengan rencana. Bahkan, ada juga waduk yang volume air bakunya masih di atas rencana operasional.

Pangan masih aman

Walau lahan pertanian di banyak daerah mengalami kekeringan, pasokan dan harga sejumlah komoditas pangan masih aman. Di Kabupaten Indramayu, harga beras pertanua stabil.

Seorang pemilik toko beras Maju Jaya di kawasan Pasar Mambo, Jana, mengatakan, beras kualitas premium dibanderol Rp 11 ribu per kg untuk pembelian karungan (isi 25 kg). Sedangkan, penjualan eceran paling tinggi Rp 12 ribu per kg.

Untuk beras dengan kualitas medium, saat ini harganya di kisaran Rp 9.000-Rp 10 ribu per kg. Sedangkan, harga beras dengan kualitas lebih rendah di kisaran Rp 8.000-Rp 9.000 per kg. "Harga beras masih stabil sejak Idul Fitri kemarin," kata Jana.

Selken Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan, pasokan pangan kepada para pedagang masih lancar. Pedagang pun memiliki stok pangan yang cukup untuk dijual kepada konsumen. Beberapa komoditas pangan tertentu, seperti beras, justru memiliki stok berlebih. "Kami justru bingung beras mau dijual ke mana?" katanya.

Kendati demikian, ia tetap mengkhawatirkan adanya potensi penurunan produksi. Apalagi, musim kemarau akan berlangsung lama. ■ *dedy darmawan nasution/bayu adji p/bovo pribadi/llis sri handayani/mas damayanti ed: satria kartika/yuhta*



Empat Provinsi di Jawa Terdampak Kekeringan

Hlm-9

Musim kemarau mulai berdampak pada menyusutnya debit air waduk. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, debit air di 10 waduk dari 16 waduk utama berada di bawah batas rata-rata untuk operasional. Meski ada 10 waduk yang debit airnya di bawah rata-rata, Hari memastikan kondisinya masih tergolong normal. Waduk masih bisa dioperasikan sehingga distribusi air dari waduk ke permukiman sekitar masih dapat dilakukan. Sementara itu, debit air enam waduk utama lainnya, berdasarkan laporan terakhir, masih di atas rata-rata rencana operasional. Indonesia memiliki 231 waduk. Selain 16 waduk utama, terdapat pula 75 waduk besar lainnya yang tengah dipantau ketat oleh Kementerian PUPR. Dari 75 waduk itu, 14 waduk dalam kondisi normal, 55 di bawah batas rata-rata, dan enam waduk dalam kondisi kering.

Hashtag Berita :

#Irigasi #Waduk #Kekeringan #Infrastruktur #KementerianPUDanPerumahanRakyat #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #PelaksanaanProyekNasional #KementerianPPN/Bappenas #RPJMN